

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN  
DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAJENE**

**SKRIPSI**

**NURUNNISWAH**

**105730528615**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN  
DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAJENE**

**SKRIPSI**

**NURUNNIWAH  
105730528615**



Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi pada Jurusan Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

## PERSEMBAHAN

مَانِحِلَ وَالِدٌ وَوَلَدٌ أَفْضَلُ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ. (رواه الترمذي)

Artinya :

*"Tidaklah ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada budi pekerti yang baik". (HR. Tirmidzi)*

Kupersembahkan karya ini kepada Ayahanda Sampetoding dan Almarhuma Ibunda tercinta Zamrah yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan putrinya.

MOTTO

*Roda Waktu Tidak Pernah Menuntut Kita Untuk Selalu Mujur, Namun Kita Tetap Optimis Untuk selalu mencoba.*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972  
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama : **Nurunniswah**, NIM : **105730528615**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 130 / Tahun 1440 H / 2019 M, Tanggal 24 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1440 H  
24 Agustus 2019 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., M.M (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
  1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM
  2. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.SI.Ak.CA/CSP
  3. Abd Salam HB, SE., M.SI.Ak.CA
  4. Faidul Adzim, SE., M.SI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972  
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene".  
Nama Mahasiswa : Nurunniswah  
No. Stambuk/NIM : 105730523615  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan  
Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 di  
Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Makassar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Asriati, SE.,M.Si  
NIDN : 0031126303

Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.CA,CSP  
NIDN : 0915058801

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP  
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972  
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurunniswah  
Stambuk : 105730528815  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan  
Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene"

Dengan ini menyatakan bahwa :

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah **ASLI** hasil karya  
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuktikan oleh siapa pun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia  
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.


Makassar, 24 Agustus 2019

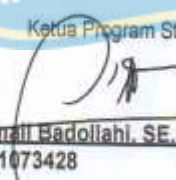
Yang Membuat Pernyataan

  
MATERAI  
6000  
Nurunniswah

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi,

  
Ismail Radolohi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP  
NBM: 903078

  
Dr. Ismail Radolohi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP  
NBM: 1073428

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Alhamdulillahirabbil'alamin atas karunia Allah SWT. Penulis yakin dan percaya bahwa jika ada kesulitan maka didalamnya terdapat dua kemudahan. Melalui kerja yang maksimal dengan segenap kemampuan, pikiran, waktu dan tenaga serta berbagai hambatan, cobaan, dan godaan, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis telah mencurahkan segala kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi lepas dari semuanya itu mengingat penulis juga masih dalam tahap belajar, tentunya tak luput dari berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan, namun inilah hasil maksimal yang dapat penulis berikan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Almarhuma Ibunda tersayang atas segala pengorbanan, doa, dan motivasi yang telah diberikan. Penyelesaian laporan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Asriati, SE.,M.Si Selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP, Selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktifitas studi penulis.
9. Terimakasih Teruntuk Keluarga Kakak Arfian Sampetoding, Ardian Sampetoding, Rina Sampetoding, Sepupu Musrifah Aliyah, Khairunnisa, M. Gautsar Al Gifaril, Zigni Agnia, dan Putri Aprilia, yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.



Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fi Sabilil haq, fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum WR.Wb*

Makassar, 24 Agustus 2019



## ABSTRAK

**NURUNNISWAH**, Tahun 2019 Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Asriati, dan Pembimbing II. Ismail Badollahi.

Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten Majene. Penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) dan beberapa observasi dan wawancara dengan pihak terkait, jenis penelitian ini bersifat Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologi. Memilih beberapa informan dengan snowball sampling dan purposif sampling. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui field research melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan siklus akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Semua tahap siklus telah dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan kelengkapan item laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan Laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisas Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan, yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal.

**Kata kunci** : Analisis Penerapan Akuntansi, Keuangan Daerah

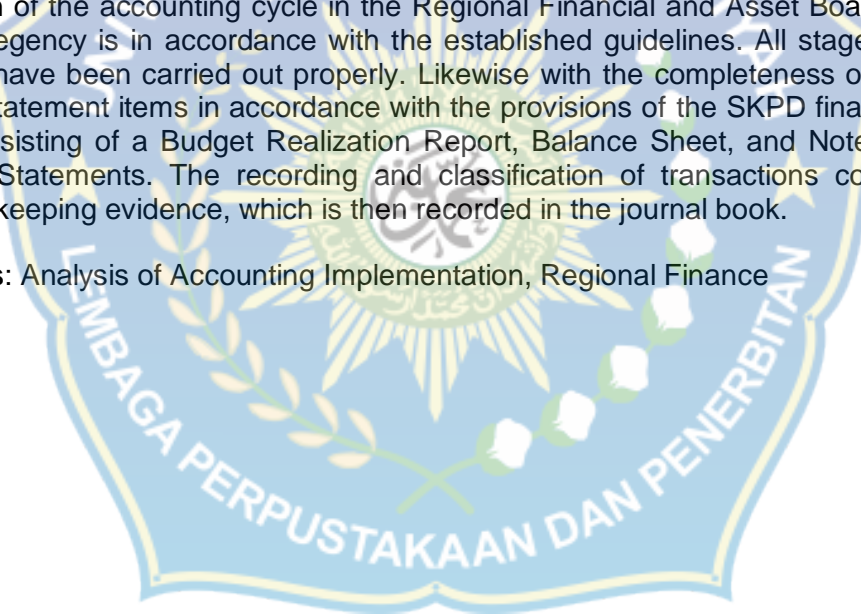


## ABSTRACT

**NURUNNISWAH**, 2019 Analysis of the Implementation of the Budget Financial Accounting System in the Regional Government of Majene Regency, Thesis of the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Asriati, and Advisor II Ismail Badollahi

This study entitled Analysis of the Application of Regional Financial Accounting Systems to the Regional Government of Majene Regency. This study aims to analyze the Application of Regional Financial Accounting Systems in Majene Regency. This study was obtained from a questionnaire (primary) and several observations and interviews with related parties, this type of research is qualitative descriptive using a juridical and sociological approach. Select several informants with snowball sampling and purposive sampling. Sources of data used are primary sources, namely information sourced from direct observation to the location of research by observation and interviews. While secondary sources are data obtained from documentation or literature studies to supplement primary data. Data collection is done through field research through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the application of the accounting cycle in the Regional Financial and Asset Board of Majene Regency is in accordance with the established guidelines. All stages of the cycle have been carried out properly. Likewise with the completeness of the financial statement items in accordance with the provisions of the SKPD financial report consisting of a Budget Realization Report, Balance Sheet, and Notes to Financial Statements. The recording and classification of transactions comes from bookkeeping evidence, which is then recorded in the journal book.

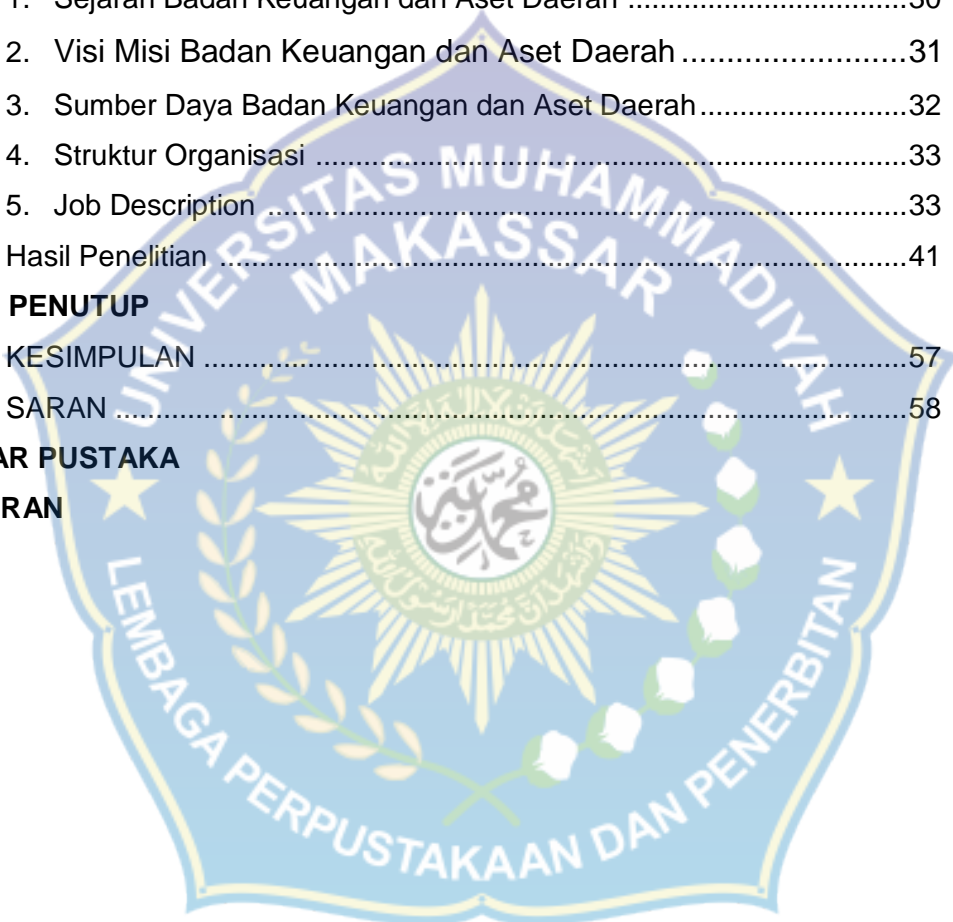
**Keywords:** Analysis of Accounting Implementation, Regional Finance



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Teoritis .....	7
1. Pengertian Sistem Akuntansi .....	7
2. Pengertian Akuntansi Pemerintahan .....	8
3. Karakteristik Akuntansi Pemerintah .....	11
4. Tujuan Akuntansi Pemerintah .....	11
5. Unsur Laporan Keuangan Pemerintah .....	12
6. Pengaruh SIA Terhadap AKuntabilitas Keuangan Daerah .....	14
7. Sistem Pencatatan Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah .....	17
8. Elemen dan Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .....	19
B. Tinjauan Empiris .....	22
C. Kerangka Konsep .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	25

B. Fokus Penelitian .....	25
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25
D. Sumber Data.....	26
E. Pengumpulan Data.....	26
F. Instrumen Penelitian .....	27
G. Metode Analisis .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	30
1. Sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah .....	30
2. Visi Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah .....	31
3. Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	32
4. Struktur Organisasi .....	33
5. Job Description .....	33
B. Hasil Penelitian .....	41
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	57
B. SARAN .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4.1 Daftar Nama Pegawai Staf BKAD Kab Majene .....	32
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran .....	54
Tabel 4.3 Neraca .....	55
Tabel 4.4 Laporan Operasional .....	56
Tabel 4.5 Laporan Perubahan Ekuitas .....	57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep .....	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	33
Gambar 4.2 Flowchart Prosedur Penyusunan Keuangan .....	42



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Sulawesi Barat yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja demi terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Majene, dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Majene dan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan pemerintah tentang susunan organisasi pemerintah, dan dilahirkan tugas pokok (tupoksi) BKAD Kabupaten Majene yaitu membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene adalah salah satu kantor pemerintahan di kota Majene yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan di bidang Keuangan dan Aset Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene sebagai salah satu daerah otonom tentunya tak terlepas dari perangkat-perangkat daerah yang dimiliki dalam mengelolah daerahnya. Namun dibalik



itu tentunya harus tetap berlandaskan Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang ada. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah sebagai penanggungjawab yang mendelegasikan kepada bawahannya sesuai dengan instansi yang berkompeten tentang keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.

Pengelolaan keuangan dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi public baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan

pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Penerapan sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas instansi dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem akuntansi keuangan yang dimaksud adalah suatu sistem akuntansi keuangan yang diterapkan secara menyeluruh. Sistem akuntansi keuangan di sebuah instansi pemerintahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah berlaku umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan dan belum memahami sistem akuntansi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Terkhusus dalam akuntansi pemerintahan (pengelolaan keuangan daerah) mengalami perubahan mendasar dikarenakan tuntutan dan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Secara umum terapat enam pergeseran dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD), yakni : dalam akuntabilitas (dari *vertical accountability* menjadi *horizontal accountability*), penyusunan anggaran (dari tradisional budget menjadi performance budget berbasis kinerja), pengendalian dan audit (dari pengendalian atau audit dan audit keuangan ke pengendalian dan audit keuangan dan kinerja), penggunaan dana APBD (dari tidak adanya konsep ekonomi, efisiensi dan efektifitas menjadi diterapkannya konsep tersebut), penerapan konsep pusat pertanggungjawaban menjadi adanya pusat pertanggung jawaban), system akuntansi keuangan pemerintahan (dari pembukuan menjadi akuntansi).

Motivasi peneliti dalam memilih judul penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, peneliti juga tertarik tentang bagaimana kinerja pegawai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sistem keuangan di daerah sebagai pemberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislative, yudikatif, dan masyarakat. Kehadirannya untuk mengatur persoalan keuangan daerah serta di harapkan dapat meminimalisasi kebocoran keuangan ata penyimpangan dalam persoalan anggaran.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku; dan
  - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi yang berlaku. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperlas pengetahuan dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir yang berhubungan dengan analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teoritis**

##### **1. Pengertian Sistem Akuntansi**

Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. Kompleksitas sistem tersebut disebabkan oleh kekhususan dari sistem yang dirancang untuk suatu organisasi bisnis sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan akan informasi oleh manajer (Abdul Halim 2015 : 1).

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan didalam perusahaan, organisasi non-profit dan lembaga pemerintah. Suatu sistem mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran). Input suatu sistem adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir, outputnya adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan sistematisasi pencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan pelaporan keuangan.

Menurut (Abdul Halim, 2015:2), dalam bukunya mengutip pengertian akuntansi menurut Accounting Principles Board, yang mana akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang

dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam membuat pilihan-pilihan ekonomis yang nalar diantara berbagai alternative arah tindakan, sementara PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan akuntansi sebagai Proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Menurut (Bastian, 2012 : 6) sistem akuntansi adalah prinsip akuntansi yang menentukan kapan transaksi keuangan harus diakui untuk tujuan laporan keuangan.

Menurut (Sadeli, 2011 : 6) Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. Kompleksitas sistem tersebut disebabkan oleh kekhususan dari sistem yang dirancang untuk suatu organisasi bisnis sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan akan informasi oleh manajer, bentuk dan jalan transaksi laporan keuangan. Sistem akuntansi terdiri atas dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasilnya..

## **2. Pengertian Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi pemerintahan adalah bentuk pengelolaan dan pencatatan keuangan yang mendasari timbulnya standar pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti DPR, masyarakat dan BPK. Lembaga pemerintah dalam melaksanakan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu

pengawasan, pendidikan dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan di gunakan. Akuntansi demikian dikenal dengan akuntansi pemerintah. Untuk dapat memahami pengertian lebih jelas mengenai akuntansi pemerintah, disini penulis mengemukakan beberapa definisi menurut para ahli.

Menurut Parera (2012 : 11) Akuntansi pemerintahan (governmental accounting) banyak menyatakan merupakan terminology lama, pada perkembangannya bergeser istilah akuntansi sektor publik, istilah ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi pemerintah merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupu tingkat daerah.

Berdasarkan beberapa definisi teori di atas mengenai standar akuntansi pemerintahan menurut PP No. 71 Tahun 2010, Darise (2011) dan Bastian (2010:137), maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan dijadikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah karena mempunyai kekuatan hukum.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi



Pemerintahan (PSAP) oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Bastian, 2010:139).

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi pemerintah :

a) Sistem pemerintah

Sistem pemerintah sangat mempengaruhi akuntansi pemerintah. Di dalam sistem monarki atau kerajaan akuntansi pemerintah banyak dipengaruhi oleh raja jika di bandingkan dengan parlemen. Akan tetapi, dalam sistem demokrasi parlemen atau presidensial akuntansi pemerintah banyak dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang mengalami *check and balances*.

b) Sifat sumber daya

Sumber daya akuntansi pemerintah bersifat tidak berhubungan langsung dengan hasilnya. Seorang warga yang menyetorkan pajak, tidak mengharapkan kontra prestasi langsung dari kontribusinya tersebut. Berbeda dengan hal ini, pada akuntansi bisnis yang sumber dayanya terkait secara langsung dengan hasilnya, seperti adanya *dividen*.

c) Politik

Akuntansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh politik. Sebagai contoh adalah anggaran yang sarat dengan aspek politik. Anggaran diartikan sebagai alat politik antara lembaga legislatif yang terdiri dari wakil partai politik dan pemerintah sebagai pemenang proses politik jangka waktu tertentu.

### 3. Karakteristik Akuntansi pemerintah

Karakteristik akuntansi pemerintahan menurut Erlina dan Rambe Sakti Omar (2015 : 23), terbagi atas beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemerintah tidak berorientasi laba sehingga didalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.
- 2) Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. Anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
- 3) Didalam akuntansi pemerintah dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana. Volume transaksi dari setiap jenis dana dalam akuntansi pemerintah sangat banyak sehingga perlu dibentuk satu dana tersendiri.
- 4) Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
- 5) Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
- 6) Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba ditahan di neraca”.

### 4. Tujuan Akuntansi Pemerintah

Sasaran dalam pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi bisnis. Adapun pemerintah

memiliki tujuan secara umum untuk mensejahterakan rakyat. Berkenaan dengan itu, akuntansi pemerintah memiliki tujuan berikut :

1. Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas lebih luas dari pada sekedar ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampikan suatu laporan keuangan.

2. Manajerial

Selain tujuan akuntabilitas, akuntansi pemerintah menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah untuk melakukan fungsi manajerial. Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, dan ekonomis.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintah diadakan untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa seperti BPK-RI (Bahtiar, Iskandar & Muchlis, 2011 :5).

**5. Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

**a. Kegunaan Anggaran**

Kegunaan anggaran menurut Erlina (2015:25) dapat dibagi atas “

- a) Kegunaan anggaran secara umum
- b) Kegunaan anggaran bagi lembaga Negara.”

Kegunaan anggaran secara umum :

- a) Memberi arahan atas kegiatan atau aktivitas yang akan dikerjakan sehingga akan menjadi terarah pada tujuan yang dikehendaki.
- b) Akan menjadi alat koordinasi antar bagian yang melaksanakan kegiatan.
- c) Anggaran akan dapat mengharmoniskan atau mensinkronkan antar bagian yang ada dalam organisasi.
- d) Anggaran akan dapat membatasi kegiatan atau aktivitas hanya pada yang penting dan perlu
- e) Anggaran dapat dijadikan alat pengawasan organisasi dengan adanya anggaran maka setiap penyimpangan yang ada akan lebih mudah diukur sehingga berbagai tindakan perbaikan dapat diambil
- f) Penggunaan metode, alat, tenaga kerja akan semakin efektif dan efisien sehingga kinerja organisasi akan semakin baik dan terarah sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisien

Kegunaan anggaran bagi lembaga Negara :

- a) Pengendalian Legislatif (DPR) terhadap eksekutif (President) jika anggaran telah diundangkan oleh legislative maka estimasi pengeluaran yang ada dalam anggaran akan menjadi patokan tertinggi yang tidak boleh dilanggar oleh presiden. Pengeluaran pemerintah diatas batas anggaran tersebut dapat dijadikan

sebagai adanya penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan di muka MPR.

- b) Pengendalian Eksekutif (Presiden) terhadap bawahannya (menteri gubernur dan seterusnya). presiden melalui APBN yang diundang kemudian akan mengalokasikan kepada setiap departemen yang ada, kepada lembaga tinggi Negara, lembaga tertinggi Negara.

#### **b. Fungsi Anggaran**

- a) Fungsi Pelaksanaan

Anggaran merupakan salah satu pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dalam dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama. Jadi, anggaran sangat penting dalam hal menyelaraskan atau mengkoordinasi setiap bagian kegiatan.

- b) Fungsi Perencanaan

Anggaran memberikan gambaran dan ilustrasi yang jelas dalam masalah unit dan uang suatu perusahaan atau organisasi.

- c) Fungsi Penawaran

Anggaran merupakan salah satu alat pengawasan atau pengendalian. Pengawasan berarti melakukan evaluasi atau menilai atas pelaksanaan suatu pekerjaan.

#### **6. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas keuangan Daerah**

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Akuntabilitas terbentuk dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang maka perlu untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, menunjang pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah maka harus perlu dikembangkan dan disusun sistem akuntansi keuangan daerah yang tepat (Keputusan Menteri Keuangan No 355/KMK07/2001).

Menurut Halim (2012:35) dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana. Dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai.

Sedangkan Teori Hafiz (2009:42) menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

publik. Guna dapat menghasilkan laporan keuangan yang semakin baik (tantangan) dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada pemerintah daerah, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai baru yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan daerah. Tidak hanya tenaga-tenaga akuntansi terampil tersebut, juga dibutuhkan adanya sistem dan prosedur pembukuan yang memadai dan kebijakan akuntansi sebagai pedoman pegawai dalam mengelola keuangan daerah.

Sejalan dengan teori di atas, Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2001 menyatakan "Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan keharusan bagi pemerintah daerah, karena dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel kepada publik.

Laporan keuangan sector public merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sector public untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan yang transparan.

Pengertian sistem pemerintah daerah menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005, tentang keuangan negara, yaitu:

Sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

## **7. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah**

### **a. Sistem Pencatatan**

Menurut permendagri Nomor 71 Tahun 2010 pasal 234 ayat 3 menegaskan bahwa pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktifitas yang berhubungan dengan uang. Pengukuran transaksi ekonomi yaitu dengan menggunakan satuan uang, oleh karena itu semua transaksi akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Pencatatan transaksi ekonomi yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan atau pengurangan oleh sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Selanjutnya Permendagri nomor 71 tahun 2010 menetapkan beberapa macam pencatatan yang dapat digunakan, yaitu :

#### **a. *Single Entry***

Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan satu kali, transaksi yang mengakibatkan pemasukan kas akan dimasukkan dalam sisi penerimaan, sedangkan yang mengurangi kas dimasukkan dalam sisi pengeluaran.

Double entry Sistem pencatatan Double entry juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debit dan kredit. Sistem pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.



*b. Triple Entry*

Dalam sistem ini pelaksanaan pencatatan menggunakan double entry tetapi ditambah pencatatan pada buku anggaran jadi pada saat pencatatan double entry dilakukan, PPK SKPD atau bagian keuangan/ SKPD juga melakukan pencatatan transaksi pada buku anggaran, sehingga pencatatan ini berimbang pada sisa anggaran. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.

*c. Dasar Pengakuan*

Setelah memahami sistem pencatatan, masih terdapat satu hal lagi yang penting dalam proses pencatatan, yaitu masalah pengakuan. Pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat.

Untuk menentukan kapan transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem/basis/dasar akuntansi, antara lain :

*a) Basis Kas (Cash Basis)*

Cash basis adalah salah satu dasar dalam melakukan pencatatan akuntansi. Pendapatan diakui di catat pada saat kas benar-benar diterima atau adanya penerimaan uang (adanya aliran kas masuk) dan biaya diakui pada saat kas benar-benar dikeluarkan.

*b) Basis Akrua (Akrua Basis)*

Basis akrual merupakan salah satu dasar dalam melakukan pencatatan akuntansi. Pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan apakah terjadi

penerimaan atau pengeluaran kas. Accrual basis ini lebih banyak digunakan dalam praktik usaha daripada cash basis accounting

c) **Basis Kas Modifikasi (*Modified Accrual Basis*)**

Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

d) **Basis Akrual Modifikasi (*Modified Accrual Basis*)**

Basis mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi pertimbangan kepraktisan.

**8. Elemen dan Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010, menetapkan elemen-elemen dan indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Elemen Sistem Akuntansi keuangan Daerah, yaitu :

a. Transaksi

Transaksi merupakan bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis.

b. Jurnal

Jurnal merupakan tulisan khusus yang memuat artikel suatu bidang ilmu tertentu. Jurnal juga merupakan tulisan yang digunakan oleh seorang yang berkompeten dibidangnya dan diterbitkan oleh suatu instansi.

c. Buku Besar

Buku besar adalah alat yang digunakan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan setiap akun aktiva, kewajiban dan modal perusahaan.

d. Neraca Saldo

Neraca saldo adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut.

e. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah proses pencocokan atau penyesuaian mengenai catatan atau fakta yang sebenarnya terjadi pada akhir masa periode akuntansi. Penyesuaian dari jurnal penyesuaian diambil dari kata neraca saldo dan data informasi penyesuaian akhir periode.

Sedangkan ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun. Sehingga saldo yang dapat merupakan saldo yang menggambarkan jumlah saldo yang sebenarnya. Fungsi jurnal penyesuaian adalah Menetapkan saldo catatan akun buku besar pada masa akhir periode, sehingga setiap perkiraan saldo yang didapat riil. Terkhusus untuk perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya, Menghitung setiap

perkiraan nominal pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan.

f. Laporan Keuangan

Selanjutnya menurut Mahmudi (2011: 276) menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

g. Jurnal Penutup

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 (nol) pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar laba/rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan riil (*assets, liabilities, capital/equity*).

2. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan elemen system akuntansi keuangan daerah tersebut, maka dapat disusun indicator sistem akuntansi keuangan daerah yaitu Jumlah item pertanyaan adalah 8 item sebagai berikut:

- a. Kesesuaian sistem dengan SAP
- b. Pengidentifikasian transaksi
- c. Pencatatan transaksi
- d. Bukti disetiap transaksi

- e. Pencatatan kronologis
- f. Pengklasifikasian transaksi
- g. Laporan keuangan setiap periode
- h. Pelaporan yang konsisten dan periode

## **B. Tinjauan Empiris**

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fitri Ningsih (2015)	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Pendalihan IV Kabupaten Rokan Hulu	Deskriptif Komparatif	Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Camat Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
2.	Billy Rivaldi Pangalila, dkk (2016)	Analisis penerapan sitem akuntansi pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	Deskriptif Kalitatif	Sudah sesuai berdasarkan peraturan akuntansi pemerintah yang berlaku dan perlu adanya penggantian nama akun pada laporan perubahan ekuitas.
3.	Zarzani (2013)	Analisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD pemerintah Aceh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Deskriptif Kalitatif	Penerapan Sistem Akuntanssi keuangan Pemerintah Daerah padaa Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. sebagai salahsatu lembaga Pemerintah Aceh belum optimal dan masih perlu ditingkatkan sebagaimana maksud PP nomor 71 Tahun 2010
4.	Winda Puspita Sari (2015)	Analisa penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang	Deskriptif Kualitatif	Dalam hal pembinaan, pelayanan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), sekaligus sangat berpengaruh kepada peningkatan kinerja aparatur pemerintah

5.	Angga Dwi Permadi dan Akmal Mulyadi (2016)	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasir rank spearman sebesar 0.506. nilai koefisien ini menunjukkan bahwa nilai r 0,506 memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana asil berada diantara $0,40 < 0,506 < 0,599$
----	--	---	--------------------	--

### C. Kerangka Konsep

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan.

Berdasarkan landasan teori diatas dapat disusun kerangka pemikiran teoritis yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 2.1 Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sangdji dan Sopiah (2010: 21) penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

#### **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian maka penelitian ini difokuskan pada : “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”.

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat dilaksanakannya penelitian ini pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene yang berlokasi Jl. Gatot Subroto No.59 Kec.Banggae Kel.Pangaliali Kab.Majene Sulawesi Barat. Waktu penelitian direncanakan dalam kurung waktu kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.



#### **D. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

##### **1. Data Primer**

Menurut Sanusi (2014: 104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data tersebut dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

##### **2. Data Sekunder**

Menurut Sanusi (2014: 104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.

#### **E. Pengumpulan Data**

Menurut Faridah (2015), Dalam penelitian kualitatif menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

##### **1. Observasi**

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Menurut Sutopo (2010), teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.

##### **2. Wawancara**

Dalam penelitian ini wawancara memegang peran penting karena di gunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seseorang lainnya memberikan informasi (Noerdiawan, 2010: 180).

Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi secara langsung dengan aparat pemerintah yang bertugas mengelola keuangan. Sebelum dilangsungkan wawancara, Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam.

### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada bagian keuangan sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene

## **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama penelitian sendiri, kamera, buku catatan, dan pedoman wawancara.

## **G. Metode Analisis**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Menurut Faridah (2015), Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan sebagai berikut :

### 1. Mengorganisir Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan draft pertanyaan pada objek wawancara. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Hal ini dilakukan agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan.

#### 2. Penyederhanaan Data

Setelah data diorganisir, kemudian data yang didapatkan disederhanakan dalam bentuk pengurangan data yaitu membuang atau mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat di proses ke langkah selanjutnya.

#### 3. Proses Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Apabila jawaban tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

#### 4. Hasil Interpretasi

Hasil interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman coding data pada penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi

tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Dalam melakukan interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada setting penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Majene**

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten Majene untuk Pengelolaan keuangan ditangani oleh bagian keuangan secretariat daerah dan untuk Barang Milik Daerah/Aset di tandatangani Bagian Umum secretariat daerah, sedangkan pendapatan dikelolah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Majene untuk peningkatan kinerja tahun 2014, dibentuklah Lembaga Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Majene di dasarnya pada peraturan Daerah No.13 tahun 2008 sesuai peraturan pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah .

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Majene ditetapkan pada tanggal 18 November 2008 dipimpin oleh Kepala Dinas Drs.H RAMLI PULOO MM. Pada bulan Februari tahun 2013 Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah di lebur menjadi dua Dinas yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) ini bertujuan untuk memacu dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) dipimpin oleh Kepala Dinas H. MUH. FADLIN FK, S.Pd. MH dan Dinas pendapatan daerah (Dispenda) Drs. H RAMLI PULOO

MM. Pada tahun 2014 DPKAD dipimpin oleh Drs. RAMLI MH dan pada tahun 2015 mengalami perubahan pembentukan organisasi dan tata kerja berdasarkan peraturan daerah No.3 tahun 2015 dimana struktur organisasi DPKAD berubah seperti penambahan bidang perbendaharaan dan perubahan atas nama masing-masing nomenklatur jabatan. Pada tahun 2016 Kepala DPKAD yang dijabat oleh Kadis( Kepala Dinas ) bernama Ir. H. MUHAMMAD FAUZI melalui surat keputusan bupati Nomor:820/BK-DD/678/VI/2016 Pada tanggal 17 juni 2016, dan pada tanggal 1 April 2017 Kepala DPKAD atasnama Ir. H. MUHAMMAD FAUZI, memasuki masa pensiun dan diganti oleh PLT Drs. LAWAJI. MM melalui surat keputusan Bupati Majene No:821/BK/-PSDM/231/III/2017 Pada tanggal 31 Maret 2017. Kemudian pada tahun 2017 inilah DPKAD berubah menjadi BKAD ( Badan Keuangan Dan Aset Daerah ) Kabupaten Majene, selanjutnya Drs. Lawaji MM sebagai PLT BKAD dilantik sebagai pejabat definitif kepala BKAD pada bulan february 2018, dan pada tanggal 20 september 2018 terjadi pergantian kepala BKAD yang setelah Drs Lawaji MM digantikan oleh Kasman, SE,MM berdasarkan surat keputusan bupati 1480/HK/KEP-BUP/2018 tanggal 10 september 2018 sampai sekarang masih menjabat sebagai kepala BKAD.

## **2. Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten**

### **Majene**

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Prima dalam Pelayanan

Misi : Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informasi, Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah, Meningkatkan Sarana, Prasarana dan SDM dalam Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

### 3. Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Majene

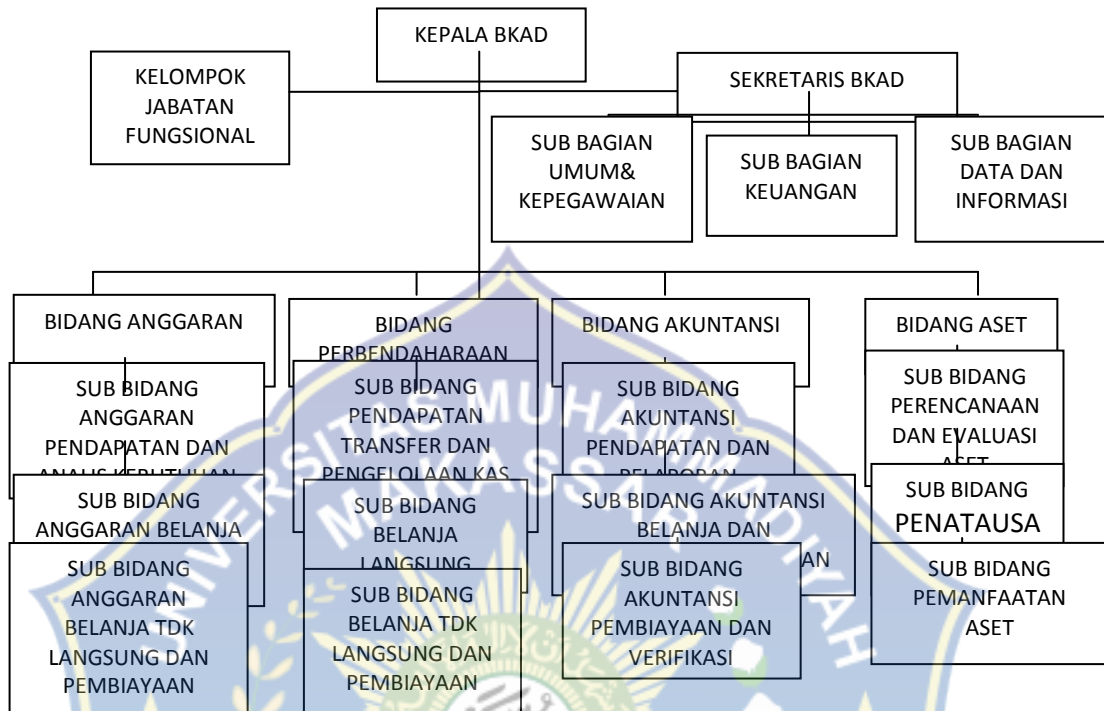
**Tabel 4.1**  
**Daftar nama-nama pegawai/staf BKAD Kabupaten Majene**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
	slon II	1	-	1
	slon III	3	1	4
	slon IV	11	4	15
	n Easlon/Staf	24	14	38
	<b>Jumlah</b>			<b>58</b>

Tabel diatas merupakan daftar nama-nama pegawai/staf BKAD Kabupaten Majene yang bekerja di bidang masing-masing yang dimana jumlah pegawai laki-laki easlon II berjumlah 1 orang, easlon III berjumlah 3 orang, easlon IV berjumlah 11 orang dan non easlon/staf berjumlah 24 orang. Begitu pula dengan pegawai perempuan terdapat easlon III dan IV berjumlah 1 dan 4 orang dan non easlon berjumlah 14 orang, jadi total jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD kabupaten sebanyak 58 orang.

#### 4. Struktur Organisasi

##### STRUKTUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

#### 5. Job Description

Struktur organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretaris, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawain
  3. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
  2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
  3. Sub Bidang SIPKD.



4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran
  2. Sub Bidang Pengelolaan Gaji
  3. Sub Bidang Kas Daerah
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan;
  2. Sub Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi;
  3. Sub Bidang Pelaporan.
6. Bidang Aset, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
  2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan;
  3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian.

a. Kepala Badan

Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina, dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi :

4. Menetapkan rumusan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat

5. Menetapkan rumusan program kerja Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat
  6. Membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku
  7. Memberi arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  8. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangandan aset daerah;
  9. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan rancangan Anggaran dan Belanja Daerah
  10. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah;
  11. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan pinjaman, jaminan, utang dan piutang daerah;
  12. Pelaksanaan tugas sebagai pejabat pengelola keuangan daerah;
  13. Pelaksanaan tugas Bendahara Umum Daerah (BUD)
  14. Menyelenggarakan kebijakan pengelolaan anggaran, akuntansi, dan penatausahaan dan aset;
- b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan melakukan koodinasi dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi, dan pengelolaan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan daerah khususnya urusan dalam, meliputi :

1. Merencanakan operasional kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas ke bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
4. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
5. Mengadakan koordinasi kepada seluruh bidang sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
6. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis setiap kegiatan sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
7. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun dilingkup BPKAD;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA), Penetapan Kinerja (TAPKIN) pada setiap bidang agar sesuai dengan pelaksanaan kinerja masing-masing bidang;
9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat;

10. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal;
11. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi program untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal;
12. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas sehingga pembinaan dan ketatalaksanaan dapat berjalan dengan lancar;
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

c. **Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan dibidang anggaran. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang anggaran, meliputi :

1. Pengkajian kebijakan pengalokasian anggaran daerah dan penyusunan APBD;
2. Pengkoordinasian bahan perumusan pedoman penyusunan APBD dan PAPBD;
3. Pelaksanaan rekapitulasi dokumen anggaran dan perubahan anggaran SKPD;

4. Penyusunan alokasi dan perubahan anggaran daerah dan menyusun analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
5. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran PAPBD;
6. Penyusunan alokasi dan perubahan anggaran daerah dan penyusunan analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
7. Penyiapan anggaran kas daerah;
8. Penyiapan dan penertiban SPD;
9. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;
10. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi perbendaharaan, belanja pegawai dan non pegawai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi merumuskan kebijakan dibidang perbendaharaan, pelaksanaan kedinasan lain sesuai bidang tugasnya, meliputi :

- 1 Perencanaan operasional kegiatan perbendaharaan sebagai pedoman dalam . pelaksanaan tugas;
- 2 Perumusan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan secara administratif

kepada Kepala Dinas melalui sekretaris setiap akhir tahun anggaran;  
Pelaksanaan Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan;

- 3 Pelaksanaan Penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), menetapkan penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 4 Penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan APBD;
- 5 Penyelenggaraan fungsi Kuasa BUD;
- 6 Pelaksanaan penelitian penginputan data perubahan gaji, menertibkan dan penatausahaan daftar gaji SKPD, melaksanakan rekonsiliasi data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 7 Pengkoordinasian system penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, pencocokan data (Rekonsiliasi) atas pengelolaan dan pemantauan suku bunga bank;
- 8 Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis di Bidang Perbendaharaan;
- 9 Pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta member penilaian prestasi kerja;
- 10 Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

e. Bidang Akuntansi dan pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan PKPAD dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan dibidang akuntansi dan pelaporan.

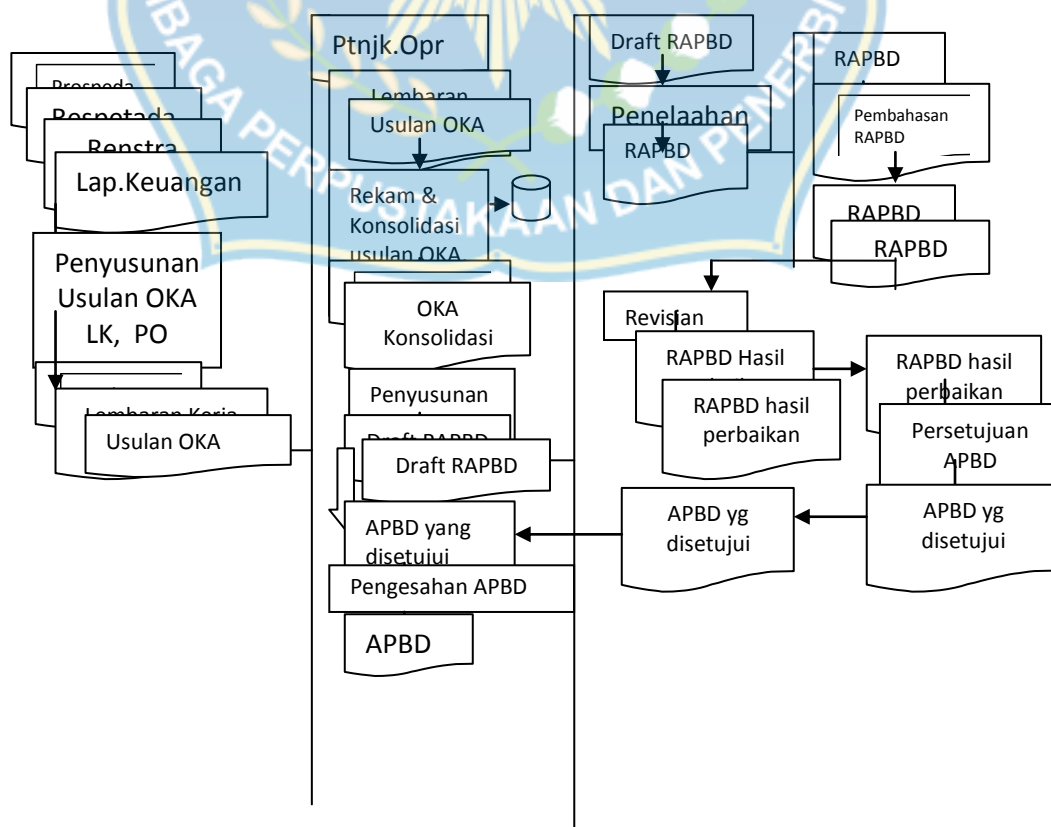
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi, meliputi:

1. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan akuntansi manajemen, keuangan, Sistem Informasi Keuangan;
2. Pelaksanaan analisis terhadap laporan keuangan dan laporan akuntansi manajemen pengelolaan keuangan daerah;
3. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan target yang ditentukan;
4. Fasilitasi dan/ atau pengkoordinasian penyusunan sistem dan prosedur akuntansi, kebijakan akuntansi serta pedoman pelaksanaan APBD dan memadai dalam rangka akuntabilitas pelaporan keuangan;
5. Penyelenggaraan pengembangan sistem informasi akuntansi dan keuangan serta bentuk-bentuk pelaporan;
6. Pengevaluasian dan penyampaian laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran dan arus kas serta catatan atas laporan keuangan yang auditable secara berkala baik semesteran maupun tahunan sesuai dengan kebijakan akuntansi;
7. Penyelenggaraan verifikasi laporan pertanggungjawaban SKPD;
8. Penyelenggaraan *stock opname* dan pemeriksaan Kas setiap tiga bulan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Majene dalam pelaporan keuangan saat ini telah berpedoman pada Pemendagri No 64 tahun 2013 dengan melaksanakan tata usaha keuangan daerah dengan pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Arus kas, Laporan Realisasi/Perhitungan APBD, Neraca dan Perhitungan Anggaran.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene melakukan penyusunan Neraca awal yang akan digunakan sebagai titik tolak pelaksanaan Sistem Keuangan daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi baik Aset atau Harta daerah, Hutang, Piutang, investasi bahkan kas dan persediaan ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene menyusun Neraca Awal. Setelah Neraca Awal tersusun Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dengan menggunakan komputerisasi. Sehingga setiap transaksi yang sudah terjadi dicatat sesuai dengan metode pencatatan yang digunakan dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Semua tahap siklus telah dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan kelengkapan item laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan Laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan.





#### **Gambar 4.2 Flowchart Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah**

Siklus keuangan daerah dimulai dengan penyusunan anggaran. Penyusunan Anggaran dimulai dengan menganalisis Laporan Pertanggungjawaban tahun lalu yang menghasilkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD akan dibahas dengan DPRD dan menjadi Perda APBD. Untuk merealisasi pelaksanaan APBD, maka dibuat Otorisasi Kredit Anggaran (OKA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO). Penyusunan OKA ini dilakukan oleh Unit Anggaran dengan Saruan kerja berdasarkan usulan OKA, LK dan PO oleh Satuan Kerja. OKA, LK, dan PO disahkan oleh Kepala Unit Anggaran.

Satuan Kerja melakukan pemungutan pendapatan dan melakukan penyetoran dana ke kas daerah dengan STS dan melakukan realisasi pengeluaran dengan SPM. STS dan SPM tersebut akan menjadi dokumen sumber pembukuan pendapatan dan belanja. Unit Pembukuan akan menerima dokumen sumber pendapatan dan pengeluaran (APBD, OKA, STS, SPM) dan membukukannya secara periodik. Pada akhir tahun, Unit Pembukuan membuat Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Perhitungan APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas yang selanjutnya diserahkan ke Unit Perhitungan Anggaran untuk dianalisis.

Unit Perhitungam Anggaran menganalisis Laporan Pertanggungjawaban dan melengkapi Laporan Pertanggungjawaban tersebut dengan Nota Perhitungan Anggaran. selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban (Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran) disampaikan ke pada Kepala Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke

DPRD sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Laporan Pertanggungjawaban.

### 1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene

- a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah, sebagai pedoman dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene;
  - a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Secara keseluruhan untuk menjalankan kebijakan diatas secara optimal peneliti juga perlu mengetahui alasan mengapa kebijakan tersebut di buat. Ketika ditanyakan kepada salah seorang staf akuntansi yang bernama Nurmia, SE, staf tersebut

mengungkapkan bahwa :

“Saya kira yang paling mengetahui alasan kebijakan tersebut di terapkan adalah para pembuat kebijakan, salah satunya adalah pemerintah itu sendiri. Tapi menurut saya sendiri, alasan utama mengapa kebijakan ini perlu diterapkan adalah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan pemerintah khususnya di Kabupaten Majene. Dengan menerapkan kebijakan ini, secara tidak langsung sistem pengelolaan keuangan kita akan berjalan dengan baik.”

Berdasarkan analisis hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa selain sikap pegawai yang mampu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, juga dalam pengelolaan keuangan daerah semua yang berperan penting dalam hal tersebut harus betul-betul berpedoman dengan ketetapan atau penerapan yang telah dibuat.

Ketika ditanyakan kepada kepala Badan Keungan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Majene Bapak Kasman Kabil SE.,MM mengungkapkan bahwa :

“Kebijakan ini kan di atur dalam peraturan Pemerintah, dimana kita berkewajiban memanfaatkan peraturan tersebut dengan baik dan bijaksana. Disini kita merasa perlu untuk mengembangkan dan memanfaatkan peraturan yang ada dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan kita.”

Pendapat tersebut diatas hampir senada dengan yang diungkapkan oleh salah seorang staf akuntansi dimana dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dijalankan dengan baik guna untuk mendapat hasil yang lebih maksimal.

## 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Majene

### SIMDA Keuangan

Ciri utama SIMDA keuangan adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. Secara umum pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian SIMDA keuangan pada BKAD Kabupaten Majene telah mengerti/paham tentang makna dan tujuan dari penerapan SIMDA keuangan. Hal ini terbukti dari wawancara dengan staf di BKAD Kabupaten Majene. Diantaranya dengan seorang staf bagian perencanaan dan keuangan yang bertugas dalam pengoperasian SIMDA keuangan bernama Abdul Halid, SE yang mengatakan :

“yang jelas SIMDA itu sebuah aplikasi komputer untuk mengolah transaksi keuangan daerah, SIMDA itu adalah sebuah sistem yang bekerja secara terintegrasi yang dirancang oleh BPKP untuk mengolah data keuangan pemerintah daerah”

Pendapat staf tersebut telah sesuai dengan pengertian SIMDA keuangan umum menurut BPKP yaitu sebuah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah. Sebuah implementasi akan berjalan dengan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Berikut ini hasil wawancara mengenai pemahaman pegawai tentang tujuan dan penerapan SIMDA keuangan pada BKAD Kabupaten Majene. Salah seorang staf yang bernama Imran mengungkapkan bahwa :

“Tujuan diterapkannya SIMDA keuangan ini untuk membantu pengolahan data keuangan, mempercepat proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah dengan adanya sistem ini, SIMDA keuangan ini juga mempermudah proses penyajian RKA, DPA, dan SPD, data tinggal diinput dan otomatis akan terolah sendiri”

Wawancara diatas menunjukkan bahwa staf BKAD Kabupaten Majene telah mengetahui secara umum tujuan dari penerapan SIMDA keuangan.

Faktor-faktor pendukung yang dimiliki BKAD Majene dalam penerapan SIMDA keuangan

Penerapan SIMDA Keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majene khususnya oleh BKAD Kabupaten Majene tentunya tidak lepas dari prakondisi yang menjadi faktor pendukungnya. Dari hasil penelitian, berbagai faktor pendukung yang dimiliki untuk menerapkan SIMDA keuangan pada BKAD Majene adalah sebagai berikut :

a) Komunikasi

Penerapan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan penerapan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, dalam hal ini kebijakan penerapan SIMDA Keuangan. Kejelasan ukuran dan tujuan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Hal ini dapat dilihat pada wawancara dengan pegawai BKAD Ibu Hatisah, berikut kutipannya :

“karena komunikasi SIMDA sudah diterapkan disini otomatis sudah komunikasi terhadap staf dan pimpinan dengan baik”

Wawancara diatas menunjukkan bahwa komunikasi telah aktif dilaksanakan, hal tersebut tentunya tidak lepas dari keaktifan para pegawai untuk menggali sumber informasi yang memadai.

b) Sumber daya Manusia

Faktor penting lain yang menjadi penentu keberhasilan penerapan suatu kebijakan yaitu upaya pengembangan sumber daya manusia. Oleh Karena itu berbagai upaya telah ditempuh oleh BKAD Kabupaten Majene guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan SDM yang menjadi factor pendukung pelaksanaan SIMDA Keuangan. Hal ini tersirat dalam wawancara dengan pegawai SIMDA Kabupaten Majene Bapak Alif, SE.,MM berikut :

“sebenarnya jika berbicara tentang kualitas tidak semua staf yang memakainya contohnya diruangan ini hanya bendahara memakai SIMDA diruangan bawah hanya perencanaan yang memakai jadi kita tidak bisa ukur sebenarnya personilnya SIMDA ini hanya program pelaporan.”

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Majene staf/pegawai tidak semua menggunakan SIMDA melainkan hanya staf-staf bagian tertentu saja yang menggunakannya.

c) Struktur Birokrasi Pengawasan

Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan salah satunya adalah tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan proses pelaksana.

**3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene**

Menurut kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah di capai
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya

Secara spesifik. Tujuan laporan keuangan pemda adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas pemda

- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemda
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan dan sumber daya ekonomi
- d) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah

Penyajian Laporan Keuangan yang digunakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Majene berdasarkan hasil wawancara yaitu terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Majene yang diperoleh oleh peneliti yaitu menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat maka informasi keuangan periode akuntansi dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya.

Salah satu informan pegawai staf Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Majene atas nama Arfian Akbar menyatakan bahwa :

“Pengelolaan keuangan di tempat ini memiliki tujuan utama yakni agar seluruh proses penyusunan keuangan daerah berjalan semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi”.

Wawancara diatas menunjukkan bahwa Daerah Kabupaten Majene dalam pengelolaan keuangan berjalan cukup baik sehingga penerapannya dapat terlaksana dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Adapula informan lain pegawai staf Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabpaten Majene Ibu Fatmala mengemukakan pendapatnya yaitu :

“Menurut saya tujuan pengelolaan keuangan daerah di tempat ini yaitu untuk mempertajam esensi sistem penyelenggaraan



pemerintah daerah dan hal yang lebih penting adalah untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Majene.”

Penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Majene telah berjalan dengan baik yaitu untuk mendapatkan kualitas dan kemampuan dalam hal penyusunan laporan keuangan serta keinginan dalam evektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 4.2

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Thn Anggaran 2018**

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
<b>PENDAPATAN</b>	96.581.250.00	79.989.723.287.00	80
<b>pendapatan Asli Daerah</b>	96.581.250.00	79.989.723.287.00	80
pendapatan Retribusi Daerah	0.00	-	-
D yang dipisahkan	18.000.000.00	33.225.161.415.00	10

	in-lain PAD yang sah	78.581.250.00	46.764.415.161.00	70
	<b>BELANJA</b>	31.727.099.00	32.401.951.905.00	88
	<b>BELANJA OPERASI</b>	27.437.697.00	29.242.328.295.00	88
	Belanja Pegawai	15.876.974.097.00	15.181.660.981.00	95
	Belanja Barang	17.250.463.000.00	14.060.667.314.00	81
	<b>BELANJA MODAL</b>	3.404.290.000.00	3.219.623.610.00	94
	Belanja Peralatan dan Mesin	3.404.290.000.00	3.219.623.610.00	94
	Belanja Bangunan dan Gedung	48.260.519.000.00	-	-
	Belanja Jalan Irigasi dan jaringan	14.500.000.00	-	-
	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	0.00	0.00	-
	<b>TRANSFER</b>	0.00	0.00	-

Sumber : BKAD Kab.Majene

Tabel diatas menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah

daerah, yang menggambarkan kepentingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.

b. Neraca

Tabel 4.3

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2018**

NAMA PERKIRAAN	C	31 DES 2017	31 DES 2018
ASET			
<b>ASET LANCAR</b>			
Persediaan		178.0 53.52 9	109.3 35.81 9
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>178.0 53.52 9</b>	<b>109.3 35.81 9</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah		21.815.384. 500	21.815.384. 500
Peralatan dan Mesin		7.907.7 11.058	7.907.7 11.058
Gedung dan Bangnan		15.903.674. 543	15.903.674. 543
Jalan, Irigasi dan Jaringan		497.17 7.514	497.17 7.514
Aset Tetap Lainnya		30.367. 200	30.367. 200
Akumulasi penyusutan		(9.005.898. 782)	(7.997.626. 259)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>37.148.416. 033</b>	<b>37.278.825. 562</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>37.148.416. 033</b>	<b>37.278.825. 562</b>

<b>NAMA PERKIRAAN</b>	CA		
<b>KEWAJIBAN</b>			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga		39.02 4.663	46.24 7.925
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		39.02 4.663	46.24 7.925
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		39.02 4.663	46.24 7.925
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas Dana Lancar		-	63.08 7.894
Ekuitas Dana Investasi		-	37.297.69 5.310
Ekuitas		37.287.44 4.899	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		37.287.44 4.899	37.360.78 3.204
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		37.326.46 9.562	37.407.03 1.129

Sumber : BKAD Kab.Majene

Tabel diatas menunjukkan Laporan Neraca pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene dimana neraca diatas disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing.

## c. Laporan Operasional

Tabel 4.4

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DES 2016 DAN 2018**

NAMA PERKIRAAN	KT	TAHUN 2018	TAHUN 2017
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak		31.645.300.00	30.526.342.00
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>		31.645.300.00	30.526.342.00
<b>BAN OPERASIONAL</b>			
ban Pegawai		400.835.627.00	789.604.121.00
ban Persediaan		409.421.381.00	373.325.836.00
ban Barang dan Jasa		588.118.819.00	440.049.352.00
ban pemeliharaan		979.554.807.00	940.811.743.00
ban Perjalanan Dinas		564.682.174.00	810.709.124.00
ban Penyusutan dan Amortisasi		925.506.086.00	159.575.235.00
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		868.119.894.00	514.075.411.00
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasi</b>		(.836.474.594.00)	(.483.549.069.00)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>PLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		33.517.232.00	43.792.336.00
ban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		122.010.00	0,00
<b>Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		33.395.222.00	43.792.336.00
<b>Surplus (Defisit) Dari kegiatan Non Operasional</b>		33.395.222.00	43.792.336.00
<b>SURPLUS (DEFISIT)-LO</b>		(.803.079.372.00)	(.439.756.733.00)

Sumber : BKAD Kab.Majene

Tabel diatas menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Laporan Operasional pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan dalam satu periode pelaporan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 4.5  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

<b>NAMA PERKIRAAN</b>	<b>TT</b>	<b>JUMLAH</b>
UITAS AWAL		360.783.204
RPLUS/(DEFISIT)-LO		(.757.430.657)
NYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		5.642.480
nyesuaian Nilai Aset		5.642.480
<b>Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan</b>		
MPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		
Reksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		
<b>Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</b>		
ANSAKSI ANTAR ENTITAS		.678.449.872
<b>NAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS</b>		(73.338.305)
<b>EKUITAS AKHIR</b>		7.287.444.899

Sumber : BKAD Kab.Majene

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene membantu kepala daerah menyelenggarakan kewenangan bidang keuangan dan asset daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara, laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan siklus akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Semua tahap siklus telah dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan kelengkapan item laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan Laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisas Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. ★ Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan, yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal. Untuk transaksi-transaksi yang sama, dicatat Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal, setiap bulan atau periode yang lain akan diringkaskan dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar. Data akuntansi yang telah dicatat dalam rekening buku besar tersebut disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran , neraca dan catatan atas laporan keuangan.



## B. Saran

Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya dan pihak lain sebagai berikut :

### 1. Bupati

- a. Perlunya pembinaan terhadap aparat pemerintahan sebagai langkah pemberdayaan kinerja aparat pemerintahan Kabupaten Majene dalam memberikan informasi yang relevan.
- b. Pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan arah pembangunan yang dilaksanakan, dengan cara lebih pro aktif dan lebih intens memberikan petunjuk dan evaluasi kinerja pemerintahan.
- c. Pemerintah harus memberikan dorongan secara intensif kepada pemerintahan agar terus menunjukkan sikap proaktif kepada masyarakat agar program pelayanan bisa berjalan dengan baik.

### 2. DPRD

- a. DPRD Provinsi Sulawesi Barat di sarankan untuk semakin intensif melaksanakan peninjauan secara langsung sebagai bagian dari rangkaian pengawasan kunjungan kerja pada berbagai instansi.
- b. DPRD Provinsi Sulawesi Barat disarankan untuk secara proaktif dan menerima, menampung dan menindaklanjuti temuan atau laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan

penyimpangan penggunaan APBD oleh satuan kerja perangkat daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya di harapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian saran prasarana pendidikan dan efektivitas proses pembelajaran.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan saran prasarana pendidikan maupun efektivitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi faradila,2013. *Analisis Kesepian Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan*. Univrsitas Hasanuddin Makassar
- Adrian Sutedi, 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta
- Bastian Indra, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-tiga. Erlangga. Indonesia.
- Bastian Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Jakarta.
- Bastian, Indra & Gatot Soepriyanto. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Edisi I. Salemba Empat. Jakarta
- Billy, R.P. 2016 *Analysis Of the Implementation Of the Government Accounting System In Minahasa District Dipenda Southeas* Vol 16, No. 04 (<http://suryani.unis.blogspot.co.id/2013/06/standar-akuntansi-pemerintahan.html>).
- Badan pendidikan pelatihan keuangan kementerian keuangan, 2014. *Penerapan sistem akuntansi keuangan akuntansi berbasis akrual*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/19410-menyongsong-penerapan-akuntansi-pemerintahan-berbasis-akrual>
- Cristy Sopotan, 2015. *Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan pp nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Manado, Indonesia
- Deddi, 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Pengertian Akuntansi Pemerintahan*. Pustaka baru press
- Halim Abdul, 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Teori Konsep dan Aplikasi*. Jilid 1. Salemba Empat. Indonesia
- Indratno Albertus, 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi Untuk Pemula dan Orang Awam*. Dunia Cerdas. Indonesia
- Isa Shafiratun Fierda, 2015, *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*, Skripsi, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan ekonomi: Bagaimana meneliti dan menulis tesis*. Edisi ketiga. Erlangga: Jakarta

Parere, 2012. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD*.

Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.

Pupung Musarofah, 2011. *Sistem Akuntansi Pemerintahan* <http://pupungmusarofah.blogspot.co.id/2013/03/sistem-akuntansi-pemerintahan-daerah.html>

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.

Sakti Omar, 2015. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD*. Salemba Empat. Jakarta.

Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Pertimbangan Pusat Dan Daerah. Tim evaluasi 2002, *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (buku 4 evaluasi pembiayaan dan informasi keuangan daerah)*. Jakarta.

White, J. G. dan G. Hancourt, 2012. *Double Entry Book Keeping: a conversation. The Economic and labour relations review*. Vol 23, No. 2, hlm. 89-104. <http://ijact.org/volume2issue6/IJ0260029.pdf>

Suri Yani, 2013. *Standar akuntansi pemerintahan*. <http://suryani.unis.blogspot.co.id/2013/06/standar-akuntansi-pemerintahan.html>



**DOKUMENTASI**



## DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimanakah kebijakan akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Majene?
2. Apa alasan pembuatan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah?
3. Bagaimanakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Kabupaten Majene ?
4. Apa itu SIMDA?
5. Apa tujuan penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene?
6. Siapa saja yang dapat menggunakan SIMDA?
7. Apa tujuan pengelolaan keuangan ?



## **BIOGRAFI PENULIS**



Nurunniswah panggilan Nunu lahir di Majene pada Tanggal 15 September 1996 dari pasangan suami istri Bapak Sampetoding dan Ibu Zamrah. Peneliti adalah anak ke empat dari empat bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Adam No 23 RT/RW 004/004 Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDN Inpres 25 Galung-galung

lulus Tahun 2010, SMP Negeri 1 Pamboang lulus Tahun 2012, SMA Negeri 1 Pamboang lulus Tahun 2015, dan mulai tahun 2015 mengikuti program S1 Akuntansi di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang tahun 2019. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH)